



PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

🏠 Jl. Tanjung No.11 A Kota Semarang, Kota Semarang

☎ (024) 86405241

📠 (024) 86405241

2022



LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR BKK Jateng (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

2 Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Manajemen Perusahaan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Culture Values), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki rewards and punishment system.

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BKK Jateng (perseroda) telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR BKK Jateng (perseroda) menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR BKK Jateng (perseroda)

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : KOESNANTO</p> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Penentuan kebijakan umum dan memimpin Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum, serta bisnis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Pelaksanaan kepengurusan harta kekayaan Perusahaan dan mengelola transaksi atau hubungan usaha dan keuangan Perusahaan d. Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi penyediaan system pengelolaan pengamanan teknologi informasi e. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan Perusahaan kepada nasabah f. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun, bersama-sama dengan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris g. Penyusunan struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan h. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) i. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris j. Pengendalian dan pengawasan pemberian kredit, pendanaan, operasional dan pengelolaan sumber daya manusia k. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku l. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan karyawan dalam rangka penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan Perusahaan dan pedoman operasional Perusahaan m. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam</p>

		operasional Perusahaan baik dalam hal pemasaran maupun operasional layanan perbankan yang lain agar sesuai dengan visi misi Perusahaan, n. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda) kepada OJK Pemegang Saham atau Otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: MOH. SYAFII
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang pemasaran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama - sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya d. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran pemasaran yang telah disetujui Dewan Komisaris e. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Pemasaran yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku f. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana dengan penerapan prinsip kehati - hatian untuk menjaga performa kualitas dan kuantitas asset produktif dalam rangka optimalisasi pendapatan Perusahaan dan efektifitas biaya g. Penyelenggarakan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran kredit sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian h. Penyelenggaraan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan dan hapus buku i. Penyelenggaraan evaluasi dan pengembangan terhadap produk dan layanan Perusahaan demi terciptanya tingkat daya saing dalam pemasaran.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DRAJAT ADHITYA WALDI
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang administrasi keuangan, operasional, kepegawaian dan umum dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank



		<p>c. Pelaksanaan kepengurusan harta kekayaan Perusahaan dan mengelola transaksi atau hubungan usaha dan keuangan Perusahaan</p> <p>d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya</p> <p>e. Penyusunan rencana struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan</p> <p>f. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris</p> <p>g. Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi penyediaan system pengelolaan pengamanan teknologi informasi</p> <p>h. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan Perusahaan kepada nasabah</p> <p>i. Pengendalian dan pengawasan pendanaan operasional dan pengelolaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya</p> <p>j. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>k. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap kesesuaian penggunaan anggaran rencana kerja.</p>
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	Nama	: SARWINI SUPRIATI
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan</p> <p>b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang pemasaran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank</p> <p>c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran pemasaran yang telah disetujui Dewan Komisaris</p> <p>e. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Pemasaran yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>f. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana dengan penerapan prinsipkehati hatian untuk menjaga performa kualitas dan kuantitas asset produktif dalam rangka optimalisasi pendapatan Perusahaan dan efektifitas biaya</p>

	<p>g. Penyelenggaraan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran kredit sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian</p> <p>h. Penyelenggaraan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan dan hapus buku</p> <p>i. Penyelenggaraan evaluasi dan pengembangan terhadap produk dan layanan Perusahaan demi terciptanya tingkat daya saing dalam pemasaran.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.</p> <p>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.</p> <p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi	
-	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Pemantauan dan Evaluasi perencanaan serta pemantauan tindaklanjut hasil audit, melakukan penilaian terhadap kecukupan pelaporan keuangan
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan SKMR, memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko kepada dewan komisaris

3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Tugas dan Tanggung Jawab :Pemberian Rekomendasi kepada Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris direksi untuk disampaikan kepada RUPS, Rekomendasi mengenai calon anggota dewan komisaris, Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
---	--------------------------------	--

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	GEDE SUJANA	Bidang Audit	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
1	ARIF SUWASONO	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
1	M. AGUNG SURYAATMAJA	Bidang Audit	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
1	SAIFUL AZIS NASUTION	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	FAHMY AKBAR IDRIES	Bidang Audit	Ketua	Tidak Menjabat	Ketua	Ya
1	HERU SUPRIHATI	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak Menjabat	Ya
1	BUDI SUSETYONO	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	<p data-bbox="416 277 580 309">Komite Audit</p> <hr/> <p data-bbox="416 322 1433 857"> Program Kerja : a. Melakukan Evaluasi terhadap Perencanaan pemeriksaan SKAI thn 2022. b. Melakukan Pemantauan Kesesuaian Laporan Keuangan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) c. Melakukan Pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja Suhartono terhadap PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dengan Standar Audit. d. Melakukan Rapat Komite Audit setiap semester dengan materi pembahasan hasil pemeriksaan SKAI terkait dengan temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi. e. Pemberian rekomendasi terkait dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS terkait Laporan Keuangan Tahun 2022. </p> <hr/> <p data-bbox="416 871 1433 1339"> Realisasi : a. Perencanaan sebanyak 29 KC terealisasi sebanyak 19 KC (65,52%). b. Dalam melakukan pemeriksaan, SKAI telah berpedoman dan mengacu pada SAK ETAP dan sistem Accrual Basis. c. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono telah memenuhi Standar Umum antara lain sudah menengacu SAK ETAP dan penilaian rasio - rasio yang menunjang Tingkat Kesehatan Bank. d. Direksi telah menindaklanjuti temuan SKAI , namun belum dilaksanakan secara maksimal e. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah ditunjuk KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022. </p> <hr/> <p data-bbox="416 1352 715 1384"> Jumlah Rapat : 5 </p>

2	Komite Pemantau Risiko	
	Program Kerja	: 1. Memastikan penerapan kebijakan MR ke seluruh Unit Kerja. 2. Melakukan Evaluasi Kebijakan MR dengan pelaksanaannya. 3. Melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas KMR 4. Melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas SKMR. 5. Memberikan rekomendasi terhadap penerapan MR kepada Dekom.
	Realisasi	: 1. Mengikuti kegiatan Exit meeting pemeriksaan SKAI ke 17 Kantor Cabang. 2. Melakukan pemantauan penanganan NPL pada 8 Kantor Cabang. 3. Pembahasan dan Pemberian arahan terhadap temuan pemeriksaan OJK. 4. Melakukan Evaluasi SKMR dengan menyusun pengembangan penilaian profil risiko dengan menambahkan parameter dimasing masing jenis risiko sesuai temuan pemeriksaan OJK. 5. Evaluasi hasil penilaian Profil Risiko dari SKMR.
	Jumlah Rapat	: 5
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Program Kerja	: 1. Pemberian rekomendasi kebijakan remunerasi bagi pengurus. 2. Pemberian rekomendasi pengangkatan pejabat Eksekutif.
	Realisasi	: 1. Remunerasi bagi pengurus sesuai ketentuan dan ketentuan kemampuan perusahaan. 2. Pemberian fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas bagi Direksi. 3. Pemberian fasilitas penunjang penampilan bagi Direksi. 4. Pembahasan THR untuk pengurus 5. Pembahasan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif dan struktural.
	Jumlah Rapat	: 5

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	KOESNANTO	-	-
2	MOH. SYAFII	-	-
3	DRAJAT ADHITYA WALDI	-	-
4	SARWINI SUPRIATI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESNANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOH. SYAFII	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DRAJAT ADHITYA WALDI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	SARWINI SUPRIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESNANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOH. SYAFII	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DRAJAT ADHITYA WALDI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	SARWINI SUPRIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
-	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
-	-	-	-	-

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	4	546.312.000	4	218.524.800
2	Tunjangan	4	3.283.486.115	4	1.313.394.433
3	Tantiem	4	0	4	0
4	Kompensasi berbasis saham	4	0	4	0
5	Remunerasi lainnya	4	0	4	0
Total			3.829.798.115		1.531.919.233

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Sewa Rumah Dinas	-
2	Transportasi	Mobil Dinas	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,83	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,52	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-2-19	8	1.Tindak Lanjut Prudencial Meeting 2. Update Exit Meeting KC Rembang dan KC Demak 3.Tindak Lanjut Desk RBB 2022 4.Lain-lain
2	2022-3-2	4	Agenda Evaluasi Kinerja PT BPR BKK Jateng (Perseroda) bulan Februari 2022, Pembahasan Fraud, Penerapan Kepatuhan
3	2022-3-12	8	Agenda Rapat Evaluasi Cabang Koordinator PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
4	2022-4-1	8	1.Evaluasi Kinerja Maret 2022 2.Lain-lain
5	2022-5-31	4	1. Capaian Kinerja 2. Pembahasan Tata Kelola
6	2022-6-11	8	1.Evaluasi RBB Tahun 2022 2.Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
7	2022-6-25	8	1.Evaluasi Kinerja Mei 2022 dan Capaian Kinerja per 23 Juni 2022 2. Evaluasi Sementara hasil pemeriksaan OJK 3.Evaluasi RBB 2022 4.Lain-lain
8	2022-6-27	4	1. Capaian Kinerja 2. Pembahasan Manajemen risiko dan Kepatuhan 3. Pembahasan APU PPT dan strategi Fraud 4. Lain-lain
9	2022-7-28	4	1. Pembahasan Tindak lanjut pemeriksaan OJK 2. Pembahasan Penilaian Profil risiko 3. Pembahasan evaluasi SOTK 4. Lain-lain
10	2022-7-29	8	1.Paparan SOTK baru 2.Agenda Mutasi dan Rotasi Pejabat Eksekutif dan Pejabat Struktural 3.Agenda Lainnya
11	2022-8-24	4	1. Evaluasi Kinerja Juli 2022 2. Pembahasan POJK tentang Lapbul dan SEOJK tentang TKS BPR
12	2022-9-28	4	1. Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan OJK 2. Evaluasi Kinerja dan NPL 3. Lain-lain
13	2022-10-21	8	1.Pembahasan Kinerja dan Capaian RBB bulan September 2022 2.Lain-lain
14	2022-11-30	4	1. Pembahasan Kinerja Oktober 2022. 2.Pembahasan dan Persetujuan RBB 2023 3. Pembahasan Perlindungan Konsumen
15	2022-12-15	4	1. Pembahasan ALMA 2. Pembahasan audit KAP 3. Pembahasan Saving Manajemen /rekening tabungan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
-	-	-	-	-

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	4	16	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	4	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	5	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	2
Dalam proses penyelesaian	-	3
Total	-	5

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR BKK Jateng (Perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), Terima Kasih.